

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	xliv
KATA PENGANTAR	lxxvi
DAFTAR ISI	lxxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kerangka Konseptual.....	21
1. Rekonstruksi	21
2. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak	23
3. Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.....	26
4. Konsep Diversi.....	27

5.	Konsep Keadilan Restoratif	30
F.	Kerangka Teori	38
1.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Keadilan.....	38
1)	Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam.....	49
2)	Teori Keadilan Pancasila	56
3)	Teori Keadilan menurut Filosof Barat	57
2.	<i>Middle Theory</i> (Teori Tengah): Teori Efektivitas Hukum/ <i>Legal System Theory</i>	72
3.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi): Teori <i>Restoratif Justice</i>	75
4.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi): Teori Hukum Progresif	82
5.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi): Teori Kontrol Sosial.....	91
G.	Kerangka Pemikiran.....	97
H.	Metode Penelitian	98
1.	Paradigma Penelitian	98
2.	Sifat Penelitian.....	100
3.	Metode Pendekatan.....	100
4.	Sumber Data.....	102
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	105
6.	Teknik Analisa Data	106
I.	Orisinalitas/Keaslian Penelitian	109
J.	Sistematika Penulisan Disertasi	113
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	115
A.	Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	115

1. Pengertian Anak.....	115
2. Pengertian Perlindungan Anak	118
3. Perlindungan Anak dan Prespektif Hukum Islam.....	123
4. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	130
5. Pihak-pihak yang Melakukan Perlindungan Terhadap Anak	134
6. Hukum Perlindungan Anak.....	143
 B. Beberapa Instrumen Internasional yang kemudian menjadi sumber hukum Indonesia dalam menciptakan Undang-Undang mengenai anak	 146
1. Deklarasi Hak-Hak Anak 1959 (<i>Declaration of the Rights of the Child</i>). 147	
2. Konvensi Hak-Hak Anak 1989	150
3. Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (<i>United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice</i>) atau <i>Beijing Rules</i>	153
4. <i>Havana Rules</i>	156
5. <i>UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)</i>	156
6. <i>UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty</i>	157
7. Peraturan perundang-undangan Indonesia	158
 C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	161
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	161
2. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	162
3. Penanggulangan Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	167
4. Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak	171

5. Perlakuan Terhadap Anak Nakal.....	174
D. Peradilan Pidana Anak	176
1. Pengertian Peradilan Pidana Anak	176
2. Tujuan Peradilan Anak	178
3. Prinsip-prinsip Peradilan Anak	181
4. Tata Cara Persidangan di Pengadilan Anak	183
5. Hak-hak Anak Proses Peradilan Pidana	189
E. Peran Serta Masyarakat Dalam Diversi	197
1. Mediasi Penal Dalam Peradilan	200
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Anak.....	209
3. Penyelesaian Melalui Diversi	225

BAB III Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini.....256

A. Kebijakan Diversi Dalam Rangka Perlindungan Anak Sebagai Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak.....	256
B. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Peradilan (Litigasi).....	275
1. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Mediasi Penal	275
a. Perangkat Mediasi Penal Anak	283
b. Proses Kerja Mediasi Penal	290
2. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak dengan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	300

C. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Di Luar Peradilan (Non Litigasi)	329
1. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi.....	329
a. Diversi Sebagai Kewenangan Penegak Hukum.....	329
b. Tata Cara Pelaksanaan Diskresi	340
1). Tahap Penyidikan	343
2). Tahap Penuntutan	349
3). Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.....	353
D. Analisis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia	357
1) Peran Serta Masyarakat Terhadap Penerapan Konsep Diversi Dalam Proses Penyidikan di Polresta Medan	357
2) Peran Serta masyarakat Terhadap penerapan Konsep Diversi Dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan	367
3) Peran Serta Masyarakat terhadap Penerapan Konsep Diversi dalam Proses Pengadilan di Pengadilan Negeri Medan	378

**BAB IV Kelemahan-Kelemahan Implementasi Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui
Diversi Di Indonesia Saat Ini404**

A. Kelemahan Struktur Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini	404
---	-----

B. Kelemahan Substansi Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini	415
C. Kelemahan Kultur Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini	425
1. Pihak Korban Menginginkan Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan	436
2. Jumlah Ganti Kerugian Terlalu Besar.....	437
3. Pemahaman Masyarakat Masih Kurang	439
4. Anak Melakukan Tindak Pidana Secara Berulang-Ulang	441

BAB V Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan449

A. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Saat Ini Belum Berjalan Dengan Baik	449
1. Konsep Diversi Pada Hukum Pidana Di Indonesia	451
2. Kesesuaian Konsep Diversi Dengan Nilai Sosio-Filsofis Indonesia	454
3. Kesesuaian Diversi dengan Etika Masyarakat pancasila	455
4. Kesesuaian Konsep Diversi Dengan Moral Masyarakat Indonesia	459
5. Kesesuaian Konsep Diversi Dengan Ideologi Pancasila	461
6. Paradigma Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	465
B. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Berbagai Negara.....	471

1. Negara Australia	472
2. Negara Jepang	474
3. Negara Belanda	477
4. Negara China	482
5. Amerika Serikat	485
6. Negara-negara Lain	487
C. Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan	490
1. Rekonstruksi Nilai	490
2. Rekonstruksi Norma	492
3. Temuan Teori Baru/ Gagasan Baru	495
BAB VI PENUTUP	496
A. Simpulan	496
1. Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia Saat Ini Masih Belum Berjalan Dengan Baik	496
2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini.....	497
a. Kelemahan Struktur Hukum	497
b. Kelemahan Substansi Hukum	497
c. Kelemahan Kultur Hukum	498

3. Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan	499
a. Rekonstruksi Nilai.....	499
b. Rekonstruksi Norma	500
c. Temuan Teori Baru	498
B. Saran-Saran	501
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	503
1. Implikasi Teoritis.....	503
2. Implikasi Praktis	503